

## DARI DEPOK LAMA KE DEPOK BARU: Berjuang Menjadi Kota, 1970an – 1990an<sup>1</sup>

Tri Wahyuning Mudaryanti<sup>2</sup>

### Abstract

This research deals with the process of spatial development in the city of Depok, West Java and its relation to the government's policy during 1970s – 1990s. Administratively, it has become a city which is separated from the capital Jakarta since 1999, but Depok is struggling to establish its own identity. In the beginning, Depok was designed to solve the urban problems of Jakarta. In the later period, Depok experienced a slow progress for new urban area. This is due to the government's policy that continues to treat Depok as a supporting city of Jakarta. On the other hand, the presence of Universitas Indonesia in Depok fails to support the creation of an autonomous city of Depok.

**Keywords:** Depok, autonomous city, identity, policy, Universitas Indonesia

### Pendahuluan

Pada 1976, de Vyries menulis sebuah artikel yang berjudul “*De Depokkers: Geschiedenis, Sociale Structuur en Taalgebruik van een Geïsoleerde Gemeenschap*”, Judul artikel tersebut mencerminkan adanya keterasingan dari satu komunitas yang tinggal di Depok.<sup>3</sup> Depok terletak di perbatasan antara dua pusat administratif penting dalam sejarah kolonial, yaitu *Batavia*.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari disertasi penulis yang berjudul “Berkembang Dalam Bayang-bayang Jakarta: Sejarah Depok (1950-an-1990-an) di bawah bimbingan Prof. Dr. Djoko Suryo dan Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.

<sup>2</sup> Pengajar dan Peneliti di Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. E-mail: titiirsyam@yahoo.com

<sup>3</sup> Depok adalah nama desa di Jawa Barat, yang mempunyai arti pertapaan, atau tempat untuk bertapa. Lihat Suparlan.Y.B., *Kamus Kawi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), hlm. 30. Dalam Baoesastra Djawa, istilah Dépok punya dua arti yaitu sebagai *padoenoenganing adjar (pendita) atau* tempat tinggal para pandita, dan arti yang lain adalah *omah*, yang dalam hal ini diartikan sebagai perkampungan. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, C.S. Hardjasoedarma, J.C.H.R. Poedjasoedira, *Baoesastra Djawa* (J.B. Wolters Uitgevens Maatschappij: Groningen, Batavia, 1939) hlm.104.

Artikel de Vries menunjukkan bahwa di Depok, ada kegiatan dari masyarakat yang sering diidentikkan sebagai “Belanda Depok.”<sup>4</sup> Namun de Vries tidak menjelaskan kapan kehidupan di Depok dimulai. Sejalan dengan hal tersebut, Kuntowijoyo menyatakan bahwa sejarah kota muncul ketika statusnya ditetapkan sebagai milik seorang pejabat tinggi.<sup>5</sup> Dengan demikian sejarah Depok dapat dikatakan dimulai pada abad ke- 17 ketika daerah itu dimiliki oleh Cornelis Chastelein, pejabat tinggi VOC. Dalam perjalanannya Depok bertransformasi dari tanah dengan hak milik *eigendom* ke tanah partikelir dan pada 8 April 1949 pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir di seluruh Indonesia dan memberlakukan *Landreform* (Undang-Undang Agraria). Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka berakhir pula pemerintahan tanah partikelir Depok.<sup>6</sup> Sejak saat itu Depok menjadi tanah Negara, dan termasuk dalam Kawedanaan Parung, Kabupaten Buitenzorg. Kawedanaan Parung dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Parung dan Kecamatan Depok. Pusat kota berada di Pancoran Mas. Pusat kota kecamatan ini seringkali diidentikkan dengan kota Depok lama,<sup>7</sup> yang merupakan pusat kegiatan dan hunian Belanda Depok.

---

<sup>4</sup> Sebutan bagi masyarakat yang tinggal di tanah partikelir Depok, yang terbentuk sekitar abad ke-18 dari berbagai etnis di Indonesia. Dalam pembentukan masyarakat tersebut terjadi percampuran identitas antar etnis di kalangan budak yang diperjualbelikan. Istilah Belanda Depok muncul karena gaya hidup mereka yang “ke-belanda-belandaan”. Mereka mendapat persamaan hak dengan orang Eropa. Mereka bisa sekolah di sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda, berbicara memakai bahasa Belanda, dan gaya hidupnya mengikuti orang Eropa. Lihat Graafland, “Land-en Volkenkunde van *Nederlandsche Indie*- Depok: Eene etnografische studie”, dalam *Mededeelingen van weege het Nederlandsche Zendelingengenootschap*, deel XXXV. (Rotterdam, 1891), hlm. 15. Lihat juga J.W. De Vries “De Depokkers: Geschiedenis, Sociale Structuur en Talgebruik van Geisoleerde Gemeenschap” dalam *BKI*, 1976, deel 132, hlm. 232.

<sup>5</sup> Menurut Kuntowijoyo, pada abad ke-19 wilayah yang dianggap sebagai kota negara biasanya di bawah pengawasan langsung oleh pejabat tinggi administratif. Lihat Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm.51.

<sup>6</sup> Lihat Akte Notaris Soeroyo, nomor 18 Tanggal 4 Agustus 1952. Dalam akte notaris tersebut dikatakan bahwa para pemilik tanah Partikelir Depok melepaskan haknya secara sukarela kepada pemerintah. Sebagai kompensasi, pemerintah kemudian memberikan uang sebesar Rp. 229.261,28 serta beberapa gedung dan tanah yang ada kaitannya dengan agama dan pendidikan.

<sup>7</sup> Sebutan Depok Lama muncul ketika pada tahun 1976, pemerintah dalam rangka mengurangi beban penduduk, membangun Perumnas, pemukiman berskala besar di Depok. Kawasan Perumnas kemudian dikenal sebagai kawasan Depok Baru.

Proses perkembangan Depok menuju kota mandiri<sup>8</sup>, ditentukan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ketersediaan kesempatan kerja dan lapangan kerja baru. Banyaknya penglaju yang setiap hari ke Jakarta untuk bekerja, sekolah, atau tujuan lain menunjukkan bahwa Depok masih tergantung pada kota induknya, Jakarta. Faktor lain yang juga cukup penting adalah tidak adanya dukungan dari Universitas Indonesia, yang diharapkan membantu mempercepat pencitraan kota Depok menjadi pusat pertumbuhan, dan identitas baru. Harapan ini tersurat pada fungsi kota Depok, yang antara lain adalah sebagai kota permukiman, kota pendidikan, dan kota resapan air.<sup>9</sup>

### **Kemandirian Semu**

Ketika Depok dirancang menjadi satelitnya Jakarta, sebenarnya kota ini hanya dijadikan sebagai kota tempat tinggal (*dormitory town*) bagi penduduk Jakarta.<sup>10</sup> Pada saat ditetapkan sebagai Kotamadya pada 1999, kota baru ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan warganya dari segala segi. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini Depok masih belum dapat melepaskan diri dari kota Jakarta. Hal ini terjadi karena peran yang diberikan kepada kota ini adalah untuk menampung kelebihan penduduk Jakarta, yang mempunyai pekerjaan tetap di tempat asalnya, tanpa penyediaan fasilitas pekerjaan. Para migran ini setiap hari pulang pergi dari Depok-Jakarta, dan sebaliknya. Ida Bagoes Mantra menyebut mobilitas penduduk tersebut sebagai mobilitas penduduk *penglaju*.<sup>11</sup> Tabel berikut ini menunjukkan

---

<sup>8</sup> Kota mandiri dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kota yang secara ekonomis dan secara fisik memiliki kemandirian, tidak tergantung pada kota lainnya, serta mampu berperan sebagai pusat pengembangan dari suatu wilayah. Penduduknya bermukim dan berkiprah di dalam kota itu sendiri. Lihat Djoko Suyarto, "Pengembangan Kota Baru di Indonesia" dalam *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 Konsep dan Pendekatan Pembangunan perkotaan di Indonesia* (Yayasan Sugiyanto Soegiyoko, Urban and Regional Development Institute-Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), hlm. 355-356.

<sup>9</sup> Kota Depok: Profil Daerah, [www.jabarprof.go.id/index.php/pages/id/1063](http://www.jabarprof.go.id/index.php/pages/id/1063), diunduh pada 7 Juli 2015, pukul 12.31.

<sup>10</sup> Mengenai hal ini Cosmas Batubara mengatakan bahwa Depok memang direncanakan hanya untuk tempat beristirahat bagi penghuni Perumnas, sementara pekerjaan sehari-hari tetap berada di Jakarta. Wawancara dengan Cosmas Batubara, di kediamannya, Jl Cidurian, Jakarta Pusat, pada 9 Juni 2011.

<sup>11</sup> Mobilitas penduduk non permanen atau sirkuler adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Lihat Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 174-175.

jumlah penduduk Depok yang bekerja di Depok dan yang bekerja di Jakarta pada tahun 1982 dan 1987.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Depok Berdasarkan Lokasi Pekerjaan (1982 dan 1987)**

Tahun	Lokasi Tempat Kerja		
	Kotif Depok	DKI Jakarta dll	Jumlah
1982	27.127	46.434	73.561
1987	43.582	45.043	88.625

(Sumber: BKSP Jabotabek, *Studi Pengembangan Lingkungan Permukiman Depok*, 1982; Lihat juga DTKTD, RUTRK Depok, *Buku Kompilasi Data*, 1987)

Penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Jakarta, yang tergambar pada tabel 1, antara lain karena pemindahan kampus UI ke Depok pada 1987. Kepindahan tersebut, berdampak pada para karyawan dan para pengajar yang kemudian memutuskan untuk membeli rumah di Perumnas Depok I. Dengan demikian mereka tidak lagi melakukan perjalanan ulang-alik ke Jakarta. Sebagian besar penghuni Depok yang merupakan pindahan dari Jakarta adalah pegawai negeri yang bekerja di Jakarta. Perpindahan mereka ke Depok bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan persoalan permukiman. Para pendatang yang menempati kompleks Perumnas sebagian besar pindah ke Depok karena mencari tempat tinggal yang murah dalam arti sesuai dengan kemampuan, dan ada kemudahan dalam hal transportasi untuk mencapai Jakarta. Dapat dikatakan bahwa Depok hanya menjadi tempat “titipan” menginap bagi mereka, karena mereka telah mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta. Kenyataan ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Komposisi Lapangan Kerja berdasarkan Lokasi (Depok & Jakarta, 1982)**

Jenis Pekerjaan	Jakarta	Depok
<b>Non Agraris</b>		
Pegawai Negeri	31.184	-
Buruh	8.000	8.287
Pedagang	3.000	6.676
Tukang	750	663
Jasa	3.500	3.526
Industri Kecil/home industri	-	197
<b>Agraris</b>		
Petani, pemilik, penggarap, buruh tani	-	7.777
<b>Jumlah</b>	46.434	27.127

(Sumber: BKSP Jabotabek, *Studi Pengembangan Lingkungan Permukiman Depok*, 1982, hlm. 130-132)

Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga tahun 1982, belum tersedia lapangan kerja bagi pegawai negeri. Mengingat bahwa Depok adalah desa yang agraris, maka jumlah pekerjaan sebagai petani cukup besar. Meskipun dalam tabel ditunjukkan bahwa pekerjaan sebagai buruh jumlahnya lebih besar daripada petani, hal ini diasumsikan bahwa sebahagian dari mereka, pada awalnya juga berprofesi sebagai petani, namun ketika terjadi pembangunan proyek Perumnas secara besar-besaran, lahan pertanian mereka terkena pengusuran. Kenyataan ini menjadikan mereka berubah ke bidang non pertanian, seperti yang ditampilkan dalam tabel tersebut, yakni meningkatnya sektor jasa dan pedagang.

Data tabel 2 juga menunjukkan bahwa komposisi jenis pekerjaan penduduk Depok yang bekerja di Jakarta dan yang bekerja di Depok sangat berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai pegawai negeri tampak kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Realitas ini menunjukkan bahwa Jakarta mempunyai kemampuan yang besar untuk menampung tenaga kerja dari berbagai golongan dan keahlian. Sementara potensi ini tidak dimiliki oleh Depok. Hal ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan kegiatan ulang-alik Depok-Jakarta-Depok.

Faktor geografis juga memicu lambannya kemandirian Depok, karena kedekatan jarak antara Depok dan Jakarta ditambah dengan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum yang semakin membaik menyebabkan kemudahan aksesibilitas antara kedua kota itu. Namun di lain pihak, fasilitas perkotaan yang ada di Depok kurang lengkap dan kurang menarik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di Jakarta menyebabkan warga memilih melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari. Hal yang sama berlaku juga pada para mahasiswa yang lebih memilih tinggal di Jakarta dari pada harus tinggal di kamar kos.

Ketika Depok pada 1981 peran dan statusnya berubah menjadi Kota Administrasi, maka sejumlah fasilitas perkotaan juga mulai ditata kembali. Kehadiran UI secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan penyediaan fasilitas pekerjaan di bidang perdagangan<sup>12</sup> (antara lain warung makan atau restoran), dan jasa kemasyarakatan. Terbentuknya Kotif Depok pada 1981 juga memerlukan sejumlah jasa kemasyarakatan seperti PNS yang bekerja di dinas pemerintahan (Depok), dan Hankam/ABRI, perbankan dan jasa keuangan lain serta

---

<sup>12</sup> Kemungkinan Buka Usaha Bidang Jasa di Sekitar Kampus UI Depok", *Kompas*, 25 Mei 1987.

industri. Jasa kemasyarakatan itu mulai muncul di Depok, antara tahun 1982-1987 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Pertambahan Jumlah Usaha di Kotif Depok (1982- 1987)**

Bidang	Jumlah Pertambahan Usaha (unit)
Industri	22
Listrik, gas, air minum	4
Perdagangan, rumah makan, penginapan	87
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	11
Jasa Kemasyarakatan	32

(Sumber: Kantor Pemerintah Kotif Depok, *Pendaftaran Ulang dan Izin Baru di Kotif Depok Tahun 1982-1987*)

Jumlah pertambahan usaha di bidang perdagangan menunjukkan jumlah yang besar dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Namun kesempatan kerja yang ada pada bidang-bidang tersebut hanya sebatas pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas, atau di bawahnya. Untuk rumah makan misalnya, tenaga kerja yang direkrut adalah sebatas untuk pelayan, demikian juga penginapan. Artinya kesempatan kerja yang ada, tidak terlalu mengandalkan ketrampilan khusus. Sementara, bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebanyakan penduduk Depok adalah jasa di bidang pemerintahan dan perusahaan. Kegiatan di bidang industri, juga hanya sebatas industri kecil, dan industri rumah tangga, misalnya industri makanan, minuman, anyaman, bahan bangunan dengan skala lokal. Jenis kegiatan usaha kecil yang ada di Depok sampai tahun 1983 antara lain pabrik batu bata (1 buah), pembuat keranjang (70 buah) dan kerajinan bambu (36 buah).<sup>13</sup>

Dalam hal ini, Depok dikondisikan hanya sebatas sebagai tempat permukiman. Artinya, menurut pemerintah Jakarta, di Depok tidak perlu ada kegiatan industri besar. Kenyataan ini didukung dengan adanya larangan dan pembatasan untuk industri besar dan menengah, yang dituangkan dalam Keppres No. 21 Tahun 1989. Realisasi dari Keppres ini, nampak pada tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memajukan industri yang telah ada di Depok. Sebagai contoh, di dalam pemerintahan Kota Depok, tidak terdapat subdinas atau bagian industri yang mengkoordinasi industri-industri yang ada di Depok.<sup>14</sup> Kondisi Depok yang serba terbatas menyebabkan penduduk memilih menjadi *penglaju* ke kota

<sup>13</sup> *Executive Summary Jabotabek Development Planning*, 1980, hlm. 6.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Badrul Kamal, mantan Walikota Depok, Depok 21 April, 2004

metropolitan Jakarta, untuk mencukupi kebutuhannya. Banyaknya penglaju yang melakukan kegiatan di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut 4.

**Tabel 4. Tingkat Ulang-alik Masyarakat dengan Tujuan Bekerja, 1982 & 1987**

	1982	1987
	Jumlah	Jumlah
Penglaju	46.434	48.043
Penduduk kotif Depok	215.779	253.220

(Sumber: BKSP Jabotabek, *Studi Pengembangan Lingkungan Permukiman Depok*, 1982, hlm. 72)

Dilihat dari jumlah penglaju yang ada pada tabel 4, sepiantas terdapat kenaikan sekitar 1.609 orang. Namun jika jumlah penglaju dibandingkan dengan jumlah penduduk Kotif Depok, maka jumlah penglaju pada 1982 adalah sebesar 21,52% dari jumlah penduduk Depok, sementara pada tahun 1987 terjadi penurunan persentase penglaju menjadi 18,97%. Penurunan persentase jumlah penduduk tersebut diduga karena kepindahan Universitas Indonesia ke Depok. Para pengajar dan pegawai UI banyak yang tinggal di Perumnas, atau perumahan lain di Depok. Dengan demikian mereka tidak lagi melakukan perjalanan ulang-alik seperti sebelum UI pindah ke Depok.

Ulang alik tidak hanya dilakukan oleh pengajar dan karyawan UI saja, tetapi juga dari kalangan pegawai negeri yang bekerja di kementerian atau BUMN. Bahkan kaum *Belanda Depok* yang kebanyakan bekerja di dunia perbankan di Jakarta<sup>15</sup>, juga termasuk dalam migran sirkuler Depok – Jakarta. Tabel 5 menunjukkan para penglaju non Perumnas, yang berkantor di Jakarta. Perjalanan ulang-alik dari pegawai kementerian, atau badan-badan usaha lebih disebabkan karena kepindahan mereka ke Depok tidak disertai dengan perpindahan tempat kerjanya. Mengenai hal itu, *Harian Kompas* mencatat bahwa jumlah penumpang KRL setelah Perumnas selesai dibangun, rata-rata setiap bulannya jumlah penumpang KRL dari Depok (Baru) yang diangkut, rata-rata sekitar 180.000 penumpang, atau sekitar 6.000 penumpang setiap hari.<sup>16</sup> Sementara pada tahun 1990-an, pihak KAI, mencatat

<sup>15</sup> Wawancara dengan Boy Loen, YLCC, Depok tanggal 17 September 2011

<sup>16</sup> Jumlah tersebut sebenarnya hanya didasarkan pada tiket yang terjual, tidak termasuk mereka yang tidak membeli tiket. Lihat. "Puluhan Ribuan Manusia Ditumpahkan Tiap pagi Dari Depok ke Jakarta", dalam *Kompas*, 22 Oktober 1978

bahwa jumlah penglaju terus mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 6.

**Tabel 5. Daftar Perumahan Penglaju Non Perumnas (1981)**

No	Nama Perusahaan.Instansi	Lokasi	Luas (ha)
1	PT Pelita Air Crew	Rangkapan Jaya	18
2	Yayasan Arco	Rangkapan Jaya	8,3
3	Deparlu	Rangkapan Jaya	10,6
4	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	Mampang (Depok)	1,5
5	Departemen Kesehatan	Pancoran Mas	23
6	Dosen UI*)	Beji	3
7	Dosen UI	Pancoran Mas	1,6
8	PT Pupuk Kujang	Beji	10
9	Pertamina	Mekarjaya	9,7
10	PT. Bina Adhi Sejahtera	Sukmajaya	7,5
11	Departemen Pertanian	Sukmajaya	7.0
12	Samudra Indonesia	Sukmajaya	1,84
13	Departemen Penerangan RI	Cimanggis	3,5
14	Departemen Penerangan RI	Sukmajaya	20

(Sumber: Kantor Pemerintah Kotif Depok, *Evaluasi dan Laporan Pembangunan di Kotif Depok 1982-1988*)

*Keterangan:* Perumahan Dosen UI dalam tabel tersebut tidak dibangun oleh UI, melainkan atas inisiatif para dosen

**Tabel 6. Pengguna KRL yang Berangkat Dari Stasiun Depok Baru tahun 1996-1999**

Tahun	Penumpang/tahun	Penumpang/hari
1996	3.425.633	11.419
1997	3.878.916	12.930
1998	4.500.827	15.003
1999	4.635.851	15.453

(Sumber: Diolah dari *Bogor Dalam Angka 1996, 1997, 1998, dan Pancoran Mas Dalam Angka 1999*)

Data pada tabel 6 juga menunjukkan bahwa tingkat mobilitas penduduk Jakarta yang tinggal di Depok dengan menggunakan kereta api setiap harinya cukup tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kemacetan lalu lintas di Jakarta, pada akhirnya membuat mereka memilih menggunakan kereta api untuk mencapai

tempat kerjanya. Mengenai hal ini BPS mencatat bahwa ada 571.813.605 kendaraan berlalu-lalang di Jakarta selama tahun 1998 atau 1.906.045 setiap harinya.<sup>17</sup>

Pemerintah Depok juga telah berupaya untuk menyediakan lapangan kerja dan tempat usaha di Depok. Upaya yang dilakukan dengan tujuan sebagai daya tarik bagi para urban, dan mengurangi perjalanan ulang alik antara Depok – Jakarta. Dengan demikian diharapkan ketergantungan pada kota induknya dapat dikurangi.<sup>18</sup> Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum dicapai sepenuhnya. Dalam rencana jangka panjang, tujuan umum pengembangan ekonomi kota Bo(de)tabek antara lain untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:<sup>19</sup> pertama, untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bogor, Tangerang, (Depok), dan Bekasi, dan untuk menggiatkan tingkat pemerataan antar daerah. Kedua, untuk memperkecil tingkat ketergantungan dalam bidang ekonomi, dan sosial budaya terhadap Jakarta.

Untuk kota Depok pengembangan ekonomi direncanakan dikembangkan sektor perdagangan dan jasa, juga di sektor industri, sementara sektor pertanian peranannya untuk menyerap tenaga kerja semakin berkurang. Pengurangan lahan pertanian itu antara lain disebabkan adanya pembangunan perumahan secara besar-besaran dan fungsi-fungsi lain. Pada beberapa daerah di kecamatan Beji yang terletak di sekitar kampus UI, banyak penduduk Depok yang mengubah fungsi lahannya dari pertanian menjadi tempat pondokan atau menjual lahannya kepada pengusaha/penduduk Jakarta untuk dibangun pondokan atau usaha lain.

Sebelum kehadiran UI, tata guna lahan di kecamatan Depok masih didominasi oleh pertanian. Sektor pertanian memegang peranan dalam perekonomian daerahnya. Ketika Depok berangsur-angsur beralih menjadi daerah *urban*, sektor ekonominya juga bergeser ke arah sektor ekonomi *urban*, yang tidak lagi mengandalkan pada sektor pertanian. Seiring dengan pembangunan fisik kota Depok yang telah dan masih akan berlangsung, maka pada tahun 1983, lahan pertanian tanaman pangan di Depok secara keseluruhan mengalami penurunan dalam luas panen. Kecamatan Beji kehilangan lahan pertanian paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajaya. Pengurangan lahan yang cukup besar menyebabkan bidang ini tidak lagi dapat

---

<sup>17</sup>Lihat BPS, Statistik Kendaraan Bermotor, Jakarta, 1998, hlm.35-39.

<sup>18</sup> Gideon Golany. *New Town Planning: Principles and Practise* (New York: John Wiley and Sons, 1976), hlm. 128.

<sup>19</sup> BKSP Jabotabek, "Jabotabek Development Planning," *Executive Summary*, hlm. 12.

diandalkan untuk meningkatkan perekonomian kota dan penyerapan tenaga kerja secara langsung.

Sebagai Kotamadya, status Depok secara administrasi sebenarnya merupakan kota mandiri bagian dari Propinsi Jawa Barat. Namun dalam realitasnya" Depok menjadi bagian dari megapolitanisasi Jakarta. Posisi Depok yang demikian akan senantiasa membuat Depok sulit mandiri, dan tetap tergantung pada kota megapolitan Jakarta. Dalam rencana wilayah metropolitan Jabo(de)tabek, Depok belum sepenuhnya berhasil menjadi salah satu *counter magnet* dari Jakarta. Depok baru berhasil dalam hal menarik penduduk Jakarta untuk tinggal di wilayahnya, namun belum berhasil menarik kegiatan para pendatang untuk bekerja di Depok. Depok hanya sebagai kota pendukung yang melayani Jakarta, dalam hal ini menyediakan tempat tinggal dan tenaga kerja. Dengan kata lain, Depok merupakan kota setengah hati di selatan Jakarta, yang menjadi tempat hunian warga Jakarta.

Untuk memajukan kegiatan perdagangan di kota Depok, pemerintah merencanakan pembangunan pusat perbelanjaan, ruko-ruko di pusat kota, tempat rekreasi dengan restoran besar dan berbagai fasilitas rekreasi. Rencana ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 1990.<sup>20</sup> Dengan dibangunnya pusat perbelanjaan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi warga untuk berbelanja di Depok. Pembangunan pusat perbelanjaan di satu pihak, akan menyerap tenaga kerja yang relatif tidak memerlukan keahlian, namun dalam pembangunan tersebut pemerintah tidak memperhatikan daya beli warganya yang kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Artinya, pusat perbelanjaan hanya dipenuhi oleh pengunjung sekedar untuk rekreasi, bukan untuk berbelanja, akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas.

Mengenai hal ini Marco Kusumawijaya, pengamat perkotaan mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Kota Depok sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk hanya sebatas pada pembangunan hunian berikut ruang komersialnya yang dilakukan secara sporadis, dan cenderung tidak tertata.<sup>21</sup> Pusat-pusat perdagangan dibangun berhadap-hadapan di sepanjang Jl. Margonda, dan letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya. Depok merupakan bagian dari realitas Ja(de)botabek. Kota-kota tersebut merupakan sebuah entitas yang saling berhubungan dalam berbagai dimensi. Baik dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya

---

<sup>20</sup> Kantor Pemerintah Kotif Depok, *Evaluasi dan Laporan Pembangunan di Kotif Depok tahun 1987-1989*.

<sup>21</sup> *Kompas.com.*, 13/09/07.

dan lain-lain. Oleh karena itu apa yang terjadi di Jakarta, akan terjadi juga di Depok, karena kota ini terlalu berorientasi pada Jakarta. Ditambah lagi dengan sebagian besar warganya adalah warga yang berasal dari DKI Jakarta. Dalam menata kotanya, Depok seolah “menduplikasi” Jakarta. Seperti kota satelit lainnya, Depok masih tergantung pada orbitnya, Jakarta.

### **Dampak Kepindahan UI ke Depok**

Peresmian Kampus UI di Depok dilakukan oleh Presiden Soeharto pada 5 September 1987, yang ditandai dengan dengan pembubuhan tandatangan pada prasasti, bertempat di Balai Kirti. Kehadiran kampus Universitas Indonesia di Depok, membuat Depok disebut-sebut sebagai kota pendidikan. Di samping itu, kepindahan UI betrsama civitas akademiknya memunculkan tumbuhnya sektor informal baru, yang tidak disediakan oleh Universitas Indonesia, seperti tempat pemondokan bagi para mahasiswa dan pengajar.

Namun di lain pihak, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, **integrasi antara kampus UI dengan sistem masyarakatnya kurang berjalan dengan baik. Hal ini nampak pada tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya masih rendah, sehingga tidak banyak diserap oleh UI, ketika UI membuka lowongan kerja.** Di samping itu pengaruh kehadiran UI secara langsung terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di kota Depok dapat dikatakan tidak signifikan. Beberapa kasus berikut ini menunjukkan bahwa kehadiran Universitas Indonesia merupakan aspek politis yang menjadikan kemandirian dan identitas Depok sulit dicapai. Aspek lain yang menunjukkan kemandirian Depok sulit dicapai, antara lain dapat dilihat pada beberapa aspek berikut ini.

### **Aspek Geografis**

Secara fisik Kampus UI terletak di dua lahan, yaitu propinsi Jawa Barat (sekitar 250 hektar) dan propinsi DKI Jakarta (75 hektar). Karakteristik Jakarta tetap disandang oleh UI karena meskipun secara fisik UI berada di Depok, namun secara administratif UI tetap berkedudukan di Jakarta.<sup>22</sup> Kenyataan lain yang menarik adalah penggunaan alamat untuk administrasi UI. Alamat UI dalam Kop suratnya tidak secara tegas menyatakan bahwa Kampus UI berada di Depok. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

---

<sup>22</sup> Lihat *Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI*, pasal 5.



**Gambar 1.** Contoh Kop Surat Dari Beberapa Fakultas Di Lingkungan Universitas Indonesia (Koleksi Pribadi)

Dari tiga contoh kop surat, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menggunakan alamat Kampus Baru Depok. Sementara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan Kampus Depok untuk alamat surat menyurat. Memori tentang Kampus Salemba sebagai Kampus Perjuangan nampak pada kop surat UI (Rektorat), yang dalam alamatnya tetap mencantumkan alamat Jl. Salemba 4, Jakarta untuk keperluan surat menyurat.

Alasan lain masih dicantumkannya alamat Jl. Salemba 4, lebih disebabkan pada alasan teknis, mengingat belum seluruh fakultas pindah ke Depok. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Ekonomi masih melakukan kegiatan belajar mengajar di Kampus Salemba.<sup>23</sup> Kampus Ekonomi, baru pada tahun ajaran 1993/1994 melakukan kegiatan belajar mengajar di Depok, sedangkan Fakultas Kedokteran Gigi baru bergabung ke Depok pada tahun ajaran 2013/2014.

<sup>23</sup> Lihat *Memorandum Akhir Jabatan Rektor Universitas Indonesia 1984-1993*.

Saat ini Fakultas Kedokteran masih melakukan seluruh kegiatannya di Kampus UI Jl. Salemba 4. Kesulitan utama yang dialami oleh Fakultas Kedokteran adalah karena Rumah Sakit Pendidikan sebagai sarana utama kegiatan belajar mengajar belum dibangun di Depok, meskipun lahan untuk itu sudah tersedia.

Dari contoh-contoh kop surat UI tersebut tidak ada yang menyebutkan secara tegas Kampus UI Depok untuk alamat suratnya, meskipun atribut Universitas seperti Rektorat dengan segala kelengkapannya secara fisik sudah berada di Depok. Apa yang ditunjukkan oleh kop surat tersebut, juga memperlihatkan bahwa Depok seolah bukan merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat. melainkan bagian dari Jakarta. Dalam kop surat UI juga tidak dicantumkan Depok, Jawa Barat. Ada dugaan karena kegiatan orang dari Jakarta hanya berhenti di Depok, yang sebagian lahannya berada di Jakarta, maka kata Jawa Barat tidak perlu dicantumkan.

Masih digunakannya alamat Jl. Salemba dalam kop surat tersebut menunjukkan bahwa di satu pihak kegiatan UI masih berada di dua wilayah, karena belum seluruh fakultas pindah ke Depok, dan masih kuat ingatannya dalam memori para civitas akademika Universitas Indonesia, bahwa kampus Salemba, dan Rawamangun, adalah merupakan tempat kedudukan awal Kampus Universitas Indonesia. Cuplikan lagu Genderang Mahasiswa Universitas Indonesia berikut ini mencerminkan realitas tersebut:

Universitas Indonesia, Universitas Kami  
Di Ibukota Negara, pusat ilmu budaya bangsa.....  
.....Universitas Indonesia, perlambang cinta  
Rawamangun dan Salemba, kami yang punya.

Aspek lain dari segi geografis yang menjadi salah satu penyebab yang menjadikan Jakarta terus membayangi kehidupan penghuni Depok, "titipan" Jakarta adalah masalah plat nomor kendaraan. Ketika Depok masih menjadi Kotip, plat nomor kendaraan Depok adalah F, kondisi ini berubah pada tahun 1990-an, plat nomor kendaraan Depok adalah B. Namun ada kode tertentu, yang nampak di belakang angka. Misalnya untuk kawasan Margonda dan sekitarnya nomor kendaraannya adalah B. 1234 E (KF); kode E menunjukkan mobil dengan domisili Margonda. Untuk kawasan Cinere dan sekitarnya nomor kendaraannya adalah B. 5678 Z(UK), kode Z untuk mobil warga Depok yang berdomisili di Cinere.

### Aspek Politis

Dari segi politis, pemerintah pun tidak berupaya untuk memindahkan kedudukan UI yang secara fisik hampir 85% sudah pindah ke Depok. Kenyataan ini ditunjukkan oleh Peraturan Pemerintah No. 68/2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia, pada bab II pasal 5 tetap menyebutkan: Universitas Indonesia berkedudukan di Jakarta.<sup>24</sup> Sebutan kampus baru, menyiratkan bahwa kampus UI di Depok adalah kampus yang benar-benar baru dibangun di kawasan Depok, sementara kampus lama tetap berada di Jakarta. Realitas lain yang muncul dipermukaan adalah sebagai Universitas yang berdomisili di Depok, UI tidak ikut berperan dalam kegiatan Pemilukada di Depok. Persoalannya ketika pemilihan Walikota Depok, Universitas Indonesia tetap melakukan kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi ketika ada pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Universitas Indonesia mengeluarkan edaran yang meliburkan kegiatan belajar mengajar. Kondisi tersebut adalah sebagai dampak kedudukannya secara administratif berada di Jakarta, meskipun secara fisik UI berada di Depok, menempati lahan seluas kurang lebih 250 hektar.

### Aspek Psikologis

Dari segi psikologis nampaknya ada “keengganan” mereka untuk mengakui dirinya sebagai warga Depok nampak pada data SDM Universitas Indonesia (*update* 2014) dalam tabel berikut ini.

**Tabel 7. Jumlah Pengajar, Domisili dan KTP**

Domisili	Jumlah	KTP					
		Jkt <sup>1</sup>	Bgr <sup>2</sup>	Dpk <sup>3</sup>	Tnrg <sup>4</sup>	Bks <sup>5</sup>	Lain <sup>2</sup>
Jakarta	1056	1056					
Bogor	126		126				
Depok	601	347		232			41
Tangerang	127				127		
Bekasi	101					101	
Data tidak lengkap	102	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.132	1.403	126	232	127	101	41

(Sumber: Diolah dari data di Bagian SDM UI, diperbarui pada 2014.

Keterangan: (1) Jakarta; (2) Bogor; (3) Depok; (4) Tangerang; (5) Bekasi)

<sup>24</sup> Lihat PP Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya 232 orang yang mengaku dirinya sebagai orang Depok, dari 601 pengajar yang berdomisili di Depok. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa mereka yang berdomisili di Depok, 347 pengajar tetap mempertahankan KTP Jakarta, 232 pengajar ber KTP Depok, dan 41 pengajar ber KTP dari daerahnya seperti Lampung, Medan, Pangkajene, Bandung, Krawang, Klaten, Denpasar, dan Semarang. Dari data KTP tersebut tidak terlacak berapa banyak pengajar yang mempunyai KTP ganda.

Beberapa alasan dikemukakan oleh mereka yang tetap ber KTP Jakarta meskipun berdomisili di Depok. Realitas ini nampaknya sudah menggejala pada masyarakat Jakarta yang pindah ke Depok.<sup>25</sup> Alasan yang disampaikan lebih ke alasan administratif dan kenyamanan fasilitas yang diperoleh ketika menjadi pemegang KTP Jakarta. Salah satu contoh, fasilitas kesehatan di Jakarta lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang ada di Depok. Fasilitas kesehatan untuk warga yang menggunakan BPJS Askes, lebih banyak di Jakarta. Mereka bisa berobat antara lain ke RSCM, RSPAD, RSAL, RS. Persahabatan, dan RS Jantung Harapan Kita.

### **Aspek Ekonomis**

Penyerapan tenaga kerja masyarakat Depok oleh Kampus UI juga sangat kecil. Data tersebut ditampilkan pada tabel 8. Kecilnya jumlah pegawai baru yang berdomisili di Depok yang dapat diterima oleh UI karena tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam penerimaan pegawai di Universitas Indonesia belum dapat dipenuhi. Pada 1982, dengan jumlah penduduk Depok sebanyak 223.649 jiwa, fasilitas pendidikan yang ada di Depok baru ada 19 unit Sekolah SMA untuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajaya.<sup>26</sup> Dengan demikian ada kemungkinan jumlah pelamar untuk menjadi pegawai UI kebanyakan berijazah SMP.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Syamsudin, Ketua RT 043, Kel Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, mengatakan bahwa warga di Cluster Casa de Chantique, dari 60 Kepala keluarga, sekitar 40% tidak punya KK (Kartu Keluarga), mereka melaporkan bahwa mereka tinggal di RT 043, tetapi tidak mengganti KTPnya.

<sup>26</sup> Lihat Buku Kompilasi Data Rencana Umum Kota Depok, kerjasama Pemda Tingkat II dan DTKD, Jakarta 1982.

**Tabel 8. Jumlah dan Lokasi Tempat Tinggal Pegawai Baru UI Tahun 1987-1989**

No	Jenis Pegawai Baru	Lokasi Tempat Tinggal Ketika Mendaftar		
		Kotif Depok	DKI Jakarta	Total
1	Pegawai Administrasi	27	167	194
2	Pegawai Non Administrasi	8	214	222
	Jumlah	35	381	416

(Sumber: Subbagian Pengembangan Pegawai Universitas Indonesia, Agenda Pengangkatan Pegawai Baru UI, 1989)

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan menjadi syarat utama untuk menjadi pegawai di Universitas Indonesia. Untuk pegawai Administrasi, UI menuntut minimal pendidikan lulusan SMA, sementara untuk pegawai non administrasi, diperlukan jenjang Strata-1 (Sarjana), atau lebih tinggi lagi.

Senada dengan kasus tersebut, Hawigheerst<sup>27</sup> menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah sebagai mekanisme seleksi dalam menjaring dan menempatkan orang pada posisi-posisi yang ada di masyarakat. Pendidikan dalam hal ini dapat meningkatkan derajat mobilitas dalam masyarakat. Dengan kata lain tingkat rendahnya status pekerjaan seseorang sangat tergantung pada tingkat pendidikan yang dicapainya. Anderson mengatakan bahwa pendidikan (dalam hal ini sekolah) bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi mobilitas yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mempengaruhi mobilitas untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan karena kualifikasi pekerjaan tidak hanya dipenuhi oleh sekolah formal saja.<sup>28</sup> Jaringan sosial juga berpengaruh pada mobilitas vertikal. Peluang kerja bagi anak-anak dengan latar belakang keluarga berstatus rendah lebih kecil kesempatannya untuk dapat menduduki posisi atas dengan penghasilan tinggi.

Penerimaan pegawai di awal kepindahannya menuai komentar, seolah UI tidak peduli pada masyarakat dimana secara fisik dia berdomisili. Harian *Kompas*, misalnya dalam satu ulasannya menyatakan hal yang sama, bahwa di mata masyarakat citra UI mulai pudar, UI dikesankan tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi, dan sosial budaya yang terjadi di

<sup>27</sup> Robert J. Hawigheerst, *Human Development and Education*, (New York: Longmans Green, 1953), hlm. 67-70.

<sup>28</sup> C. Arnold Anderson, " A Skeptical Note on The Relation of Vertical Mobility to Education," dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 66, No. 6, May 1961, hlm. 560-570.

sekitarnya. Baik sebagai lembaga, termasuk juga mahasiswanya, misi kerakyatannya kurang terlihat, karena UI sudah menjadi lembaga pendidikan elit.<sup>29</sup>

Menanggapi hal itu, Juwono Sudarsono, Dekan FISIP Universitas Indonesia pada waktu itu, menyatakan bahwa “pandangan masyarakat seperti itu memang tidak dapat disalahkan. Tuntutan masyarakat terhadap UI amat tinggi, mengingat perannya dulu begitu besar. Dengan semakin banyaknya lembaga perguruan tinggi lain yang juga memainkan peran serupa, mengakibatkan sosok UI menjadi agak tertutup”.<sup>30</sup> Dalam dinamika ekonomi, peran UI secara tidak langsung untuk Depok sangat besar. Perubahan sistem perekonomian yang ada di Depok dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi yang berbasis non pertanian, terjadi karena keberadaan UI. Perubahan itu terjadi sebagai dampak dari penyusutan lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan kampus Universitas Indonesia. Sumbangan lain yang secara tidak langsung diberikan oleh Universitas Indonesia pada masyarakat dan Pemerintah Kota Depok adalah pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam *Memorandum Akhir Jabatan Rektor 1986-1994*,<sup>31</sup> disebutkan bahwa kegiatan ini masih didominasi oleh kegiatan penyuluhan, serta pelayanan kesehatan dan hukum, pembinaan wajib belajar luar sekolah dan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa.

Pembangunan Kampus Universitas Indonesia di Depok terus disempurnakan dengan harapan dari kampus penyandang nama bangsa ini akan lahir hasil penelitian di bidang sains, teknologi dan seni yang bermutu tinggi dan berguna bagi pengembangan ilmu dan umat manusia. Kehadiran UI secara tidak langsung merubah tatanan ekonomi dan tatanan sosial budaya bagi masyarakat Depok, khususnya di sekitar kampus UI. UI secara tidak langsung memicu perubahan tatanan yang ada di Depok, namun apa yang telah dilakukan UI belum mencapai hasil yang maksimal. Slogan Depok sebagai Kota Pendidikan yang dicanangkan karena kepindahan UI ke Depok, belum dapat dicapai secara maksimal. Universitas Indonesia baru sebatas memberikan motivasi perubahan pola berpikir orang Depok untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, hingga ke tingkat

---

<sup>29</sup> “40 Tahun Universitas Indonesia: Gelarnya tidak lagi Seimbang dengan Prestasi”, dalam *Kompas* 1996.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Lihat *Memorandum Akhir Jabatan Rektor Universitas Indonesia*.

Perguruan Tinggi. Motivasi ini dilakukan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan, antara lain mengenai wajib belajar.<sup>32</sup>

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, Depok menghadapi berbagai masalah perkotaan. Dalam perjalanannya yang hampir setengah abad, Depok masih menemui kesulitan dalam menentukan identitasnya. Kehadiran para migran yang sebagian besar berasal dari Jakarta, untuk menghuni Perumnas, pada tahun 1970-an ternyata tidak serta merta mengubah wajah Depok menjadi kota pemukiman yang direncanakan. Dampak dari kehadiran mereka adalah permintaan terhadap kesempatan kerja, fasilitas infrastruktur, dan pelayanan kota seperti komunikasi dan transportasi, sekolah dan rumahsakit, jaringan utilitas, dan rekreasi cenderung meningkat, dan menambah beban pemerintah kota Depok.

### **Aspek Ekonomi**

Pemindahan kampus yang membutuhkan lahan ratusan hektar membawa pengaruh pada pembebasan tanah. Pembebasan tanah yang dilakukan dengan penggantian sejumlah uang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Penggusuran penduduk yang tanahnya digunakan untuk kampus UI dilakukan dengan ganti rugi. Penduduk memperoleh uang pengganti cukup besar, yang kemudian membawa mereka ke arah konsumerisme. Dari hasil ganti rugi penggusuran tanah di wilayah UI, mereka kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli motor, mobil atau alat-alat rumah tangga moderen lainnya, serta untuk membeli tanah di sekitar Kukusan (di luar pagar kampus UI sekarang), atau ke arah pinggiran yang harganya masih murah.

Penggunaan uang ganti rugi oleh masyarakat Kukusan seperti tersebut di atas terutama kepemilikan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu lambang status sosial bagi warga Kukusan. Semakin banyak dan semakin tinggi kualitas motor yang dimilikinya maka semakin tinggi pula "martabatnya. Hal senada juga dikemukakan oleh Ida Bagoes Mantra dan kawan-kawannya,<sup>33</sup> di dalam laporan penelitiannya. Hasil laporannya menunjukkan bahwa barang-barang tersebut masih merupakan simbol status sosial di kalangan masyarakat setempat.

---

<sup>32</sup> *Memorandum Serah Terima Jabatan Rektor UI, 1986-1994*, hlm 10.

<sup>33</sup> Ida Bagus Mantra, dkk., "Pola Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap daerah Yang Ditinggalkan, Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo, Madura, Ciamis, dan Asahan", *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1989.

Bahkan pemilikan harta kekayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan masyarakat setempat.

Kepindahan UI ke Depok juga mengubah struktur ekonomi yang semula berorientasi pada ekonomi keluarga menjadi ekonomi pasar. Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan berkurangnya daya serap tenaga kerja dan kesempatan usaha di sektor pertanian. Akibatnya mereka harus mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian. Mengingat bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kukusan tidak tinggi, maka sektor perdagangan mulai dari berjualan makanan hingga menjadi *makelar* tanah, menjadi pilihan masyarakat Kukusan,<sup>34</sup> Kecamatan Beji.

Bagi masyarakat desa Kukusan, peluang berusaha dan bekerja di sektor jasa lebih di dorong oleh keberadaan mahasiswa yang membutuhkan kemudahan pemenuhan kebutuhan primer dan kegiatan belajar-mengajar. Diferensiasi pekerjaan yang ada antara lain seperti pemilik rumah kontrakan, tempat kost, penjaga kost, warung makan, pelayan di tempat usaha fotokopi, dan rental komputer. Warung makan merupakan gejala baru yang muncul setelah kepindahan UI ke Depok. Di samping itu warung-warung Indomie juga muncul berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa yang kian banyak di Kukusan.

Pemilik warung makan adalah penduduk asli dan juga pendatang. Warung milik penduduk asli dan pendatang secara sepintas dapat dibedakan dari harga dan penataannya. Harga makanan di warung milik pendatang biasanya lebih mahal, dan mereka melakukan penataan ruang yang lebih rapih dan nyaman. Warung Indomie kebanyakan dimiliki pendatang dari Jawa Barat, sementara pembantu atau pekerja di warung makan umumnya pendatang dari Jawa Tengah.

Menurut Breman,<sup>35</sup> dan Manning,<sup>36</sup> kegiatan-kegiatan wirausaha di sektor jasa merupakan peluang ekonomi informal untuk memperoleh penghasilan bagi rakyat

---

<sup>34</sup> Pemilihan lokasi Desa Kukusan sebagai salah satu contoh kasus dalam pembahasan ini karena desa Kukusan, merupakan salah satu dari tiga desa yang lahannya digunakan untuk pembangunan kampus UI. Desa Kukusan merupakan desa pertama yang lahannya dibebaskan. Dengan demikian penduduk Kukusan merupakan penduduk pertama yang bersentuhan dengan uang tunai dalam bentuk besar. Oleh pemerintah tanah mereka diganti rugi senilai Rp. 750,- - Rp. 1000,-/per meter<sup>2</sup>. Lihat Gunawan Tjahjono , *et.al.*, *Kampus Universitas Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 2002), hlm.12.

<sup>35</sup> Jan Breman, "Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal", dalam Chris Manning, dan Tadjudin Noer Effendi, (ed.,) *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980).

<sup>36</sup> Chris Manning, *Struktur Opekerjaan Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1984).

lapisan bawah. Kondisi pergeseran jenis pekerjaan yang ada di Depok merupakan salah satu contoh yang mengarah kepada spesifikasi ketenagakerjaan untuk daerah perkotaan di negara berkembang. Lebih lanjut para pengamat ini berpendapat bahwa perkembangan daerah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang, ditandai dengan berkembangnya sektor informal, khususnya yang berkaitan dengan perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, kegiatan sewa-menyewa, dan distribusi kecil-kecilan seperti pedagang kelontong, pengusaha makanan jadi dan agen atas komisi (makelar).

Fenomena lain yang nampak setelah kehadiran UI adalah munculnya ketergantungan lain terhadap tanah. Jika dulu tanah diolah untuk mendapatkan uang, maka sekarang tanah dijual untuk mendapatkan uang. Penjualan tanah kemudian menjadi sesuatu yang akrab bagi kebanyakan warga Kukusan. Mereka kembali menjual tanahnya yang dulu dibeli dari hasil ganti rugi dari UI, ketika harga tanah melonjak tinggi.<sup>37</sup> Hal ini dipicu oleh “orang Jakarta” yang “menyerbu” Depok termasuk Kukusan di dalamnya, sebagai antisipasi meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, rumah makan, dan berbagai sarana penunjang bagi para mahasiswa.

Selain untuk pembangunan kampus UI, tanah di Kukusan juga dibeli oleh para pendatang, biasanya orang Jakarta, yang kemudian membangun rumah kontrakan atau tempat kos. Penduduk asli kemudian menjadi penjaga pada rumah kontrakan atau tempat kos yang dibangun di atas tanah yang semula adalah miliknya. Kehidupan mereka kemudian tergantung pada rumah yang dijaganya. Di samping sebagai penjaga keamanan, diantara mereka ada yang bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang kota yang mempunyai hubungan kerja atau usaha dengan para pendatang. Kegiatan ini mengakibatkan munculnya bentuk baru hubungan *patron-client* dimana *patron* berada di Jakarta (kota) dan *client* berada di Kukusan (sebuah desa di Depok).

Situasi yang sama ditemukan dalam penelitian mengenai Mobilitas Penduduk dan Perubahan di Pedesaan.<sup>38</sup> Akibatnya terjadilah bentuk baru hubungan *patron-client*, dimana “tuan” atau “bapak” (*patron*) berada di kota dan “anak buah” atau

---

<sup>37</sup> Pada tahun 1980-an harga tanah di Kukusan hanya berkisar antara Rp. 700,- – Rp. 1.500,- per m<sup>2</sup>. Lihat Gunawan Tjahyono, *et.al.*, *Kampus Universitas Indonesia*, (Jakarta: UI. Press, 2001), hlm. 11. Pada tahun 1990-an harga tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp.1.300.000,- - Rp. 1.500.000 per m<sup>2</sup>. Wawancara dengan Drs. Zaidi, sekretaris Desa Kukusan, 21 Mei 2004.

<sup>38</sup> Asep Djadja Saefullah, “Mobilitas Penduduk dan Perubahan di Pedesaan,” dalam *Prisma*, No. 7 Tahun XXIII, Juli 1994, hlm. 35-47.

(*client*) berada di desa. Jika awalnya, sebelum kehadiran Universitas Indonesia, pola hubungan *patron client* di Kukusan adalah pola hubungan yang biasa digunakan, yaitu hubungan antara pemilik tanah (*patron*) dengan penggarap dan buruh tani (*client*). Petani pemilik yang tanahnya luas menyerahkan sebagian pengelolaan tanahnya kepada petani penggarap yang masih ada hubungan keluarga, dan memiliki tanah meskipun tidak luas. Hasil pertanian dibagi menurut kesepakatan diantara mereka. Sementara petani yang tidak punya tanah sama sekali, bekerja sebagai buruh tani di lahan petani pemilik tanah atau petani penggarap. Di samping bekerja di lahan pertanian, para buruh seringkali di minta oleh petani pemilik tanah untuk membantu pekerjaan-pekerjaan lain seperti membersihkan halaman rumah, atau membantu jika pemilik tanah sedang ada hajatan atau pesta.

Setelah Universitas Indonesia pindah ke Depok, terjadi perubahan pola hubungan *patron-client* "konvensional", seperti yang disampaikan oleh Asep Djaja Saefullah. Jika pola hubungan *patron-client* baru ini dirinci lebih lanjut, maka hubungan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Pola hubungan *patron client* antara pemilik pemondokan dengan penjaga rumah pemondokan; (2) Pemilik tanah dengan penjaga tanah; (3) Pemilik rumahmakan dengan pelayan, dan (4) Pengusaha rental, pengusaha fotokopi dengan para pekerjanya.

Pola hubungan *patron-client* antara pemilik pemondokan dengan penjaga rumah pemondokan dalam hal ini baik pemilik pondokan maupun penjaganya bisa terdiri dari orang Jakarta dan penduduk asli. Penjaga pondokan bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat pondokan, menagih uang pondokan, memperbaiki sarana dan prasarana pondokan yang rusak. Apabila pemilik pondokan adalah penduduk Kukusan, biasanya mereka akan menjaganya sendiri atau meminta tolong pada kerabatnya. Jika pondokan dimiliki oleh orang Jakarta, biasanya penjaganya adalah kerabat atau satpam yang didatangkan oleh pemilik pondokan tersebut. Mereka digaji secara rutin setiap bulan. Namun penjaga pondokan bisa juga pemilik tanah yang tanahnya dibeli orang Jakarta, atau orang yang tinggal di dekat lokasi pondokan.

Pola hubungan antara pemilik tanah dengan penjaga tanah dalam hal ini baik orang Kukusan yang menjadi kaya akibat pembebasan lahan untuk Kampus Universitas Indonesia maupun orang yang berasal dari luar Kukusan (orang Jakarta). Pemilik tanah ini biasanya mempekerjakan orang-orang Kukusan yang tadinya adalah pemilik tanah, atau orang yang tinggal di dekat lokasi tanah tersebut sebagai penjaga tanah. Mereka, ada yang diberi imbalan rutin berupa uang gaji, ada juga

yang diberi kewenangan untuk mengambil buah-buahan atau apa saja yang dihasilkan oleh tanah yang diinvestasikan itu.<sup>39</sup>

Sama halnya dengan pemilik tanah-dan penjaga tanah, pola hubungan *patron client* antara pemilik rumahmakan dan pelayan rumahmakan. Mereka digaji setiap bulan. Para pelayan ini biasanya kerabat dekat atau orang yang satu etnis dengan pemilik rumahmakan. Warga Kukusan jarang yang mau bekerja sebagai pelayan, kecuali kalau rumahmakan tersebut adalah miliknya. Usaha rental dan fotokopi rata-rata juga dimiliki oleh orang Jakarta dan sebagian kecil orang Padang. Seperti halnya usaha makanan, usaha ini juga dengan cepat bermunculan di sekitar kampus Depok, karena merupakan salah satu pelengkap kebutuhan mahasiswa. Usaha ini dijalankan oleh orang yang digaji dan didatangkan oleh pemilik modal.

Orang Jakarta telah mengubah wajah Depok, dalam bidang ekonomi. Usaha jasa di bidang restoran yang ada di sepanjang Jl. Margonda yang pemiliknya adalah mayoritas orang Jakarta, telah mengubah jalan utama Depok menjadi miniatur kulinernya Jakarta. Warung pecel lele, dan es kelapa muda mulai terdesak oleh KFC atau Mc. Donald, dan Dunkin Donat, atau Pizza Hut, dan "Shushi Tei" sudah merambah ke Depok. Demikian pula restoran Korea, dan kedai-kedai kopi seperti Oh La La, Starbuck, dan Kopi Tiam ada di Margo City (Depok). Namun yang menarik, di sepanjang jalan Margonda, terdapat empat rumah makan khas Betawi, belum termasuk resto Betawi yang ada di Margo City.

Kegiatan untuk menghadirkan seperti apa yang ada di Jakarta, merupakan satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Depok, dalam rangka menyediakan fasilitas perkotaan untuk kenyamanan warganya, agar mereka membelanjakan uangnya di Depok dan sekitarnya. Namun apa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Depok, juga tidak terdistribusi dengan baik di ke-6 kecamatan yang ada di kota Depok.

### **Perubahan Sosial**

Komposisi penduduk di Kotif Depok berubah menjadi heterogen dalam aspek etnik, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Perubahan ini terjadi karena masuknya para pendatang, seperti pekerja, mahasiswa kos, dan pemukim baru. Seperti telah disinggung sebelumnya, mobilitas penduduk memegang peranan penting dalam perubahan sosial dengan cara membawa masyarakat dari kehidupan tradisional ke suasana dan cara hidup yang modern yang dibawanya dari kota

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan H. Bedong, penjaga kebun milik orang Jakarta, tangga 24 Maret 1998.

(Jakarta). Asep Djadja Saefullah dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pergeseran nilai dan norma termasuk dalam perubahan tersebut<sup>40</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa mobilitas penduduk menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan sosial masyarakat yang menyangkut sikap dan tingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan gaya hidup, peranan wanita, kehidupan remaja, struktur keluarga, dan jaringan kekerabatan, hubungan anak dan orang tua, solidaritas sosial, hubungan patron-client, dan partisipasi politik.<sup>41</sup>

Di Kukusan, mahasiswa UI, memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan kehidupan modern terhadap masyarakat setempat. Di samping para mahasiswa, perubahan juga dilakukan oleh media massa. Perubahan sosial tercermin antara lain dalam sikap, tingkah laku, interaksi sosial, kegiatan pendidikan. Perubahan dalam sikap, nampak dalam perubahan berpakaian dan berhias, serta makan, dan kehidupan beragama. Perubahan gaya hidup masyarakat Depok antara lain tercermin pada munculnya sejumlah kegiatan, yang polanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak di lingkungan pedesaan yang semula mengambil tempat di halaman rumah atau di rumah guru ngaji, ketika UI menempati sebagian lahan di desa Kukusan, maka kegiatan mengaji tidak lagi menggunakan rumahnya sebagai tempat belajar mengaji. Anak-anak belajar mengaji pada mahasiswa yang tinggal di pemondokan di daerah Kukusan. Tempat belajarnya juga berubah, biasanya kegiatan di kediaman guru ngaji, sekarang dilakukan di musholla atau mesjid.<sup>42</sup> Para mahasiswa UI dalam hal ini punya peran penting sebagai agen perubahan.

Perubahan sikap dalam kebiasaan berpakaian dan makan juga terjadi di daerah Kukusan. Perubahan dalam hal penampilan tidak hanya semata-mata terjadi karena evolusi alamiah atau perkembangan mode, melainkan karena ada kontak dengan dunia luar atau pihak yang memperkenalkan. Media massa dan iklan dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam cara berpakaian dan makan, di samping itu kehadiran para mahasiswa UI juga berperan terhadap perubahan sosial di daerah kukusan. Realitas ini, juga ditemukan dalam penelitian Ronald Skeldon.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Asep Djadja Saefullah, *op.cit.*, hlm.35-47.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Wawancara dengan Tasrief, mantan mahasiswa yang tinggal di RPT dan melakukan pembelajaran terhadap anak-anak di Kukusan, tanggal 26 Agustus 2009.

<sup>43</sup> Ronald Skeldon, *Population Mobility in Developing Countries: A Reinterpretation* (London and New York: Belhaven, 1990), hlm. 179.

Dalam penelitiannya dikatakan bahwa pengalamannya yang diperoleh mengenai cara berpakaian dan berhias serta pengenalan berbagai macam makanan modern menunjukkan bahwa mereka ingin dianggap sebagai orang moderen. Kasus seperti ini nampak dalam suasana mudik pada saat lebaran.

Perubahan sosial di Depok juga nampak pada munculnya hunian baru baik berupa apartemen, maupun dalam bentuk *cluster*, atau *town house* dengan nama-nama asing. Mengenai hal ini Peter J.M. Nas, dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa dalam Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Daerah Permukiman di Indonesia, yang berjudul Kota yang berjiwa Simbolik Perkotaan di Indonesia.<sup>44</sup> Dalam penelitian tersebut Nas mengatakan bahwa pada tahun 1990-an masyarakat Indonesia telah menemukan simbolik mereka sendiri. Lebih lanjut Nas menyatakan bahwa perkembangan ekonomi semu dan kesejahteraan yang bersifat spekulatif mengakibatkan pertumbuhan sejumlah pusat-pusat perbelanjaan mewah, kondominium-kondominium dan kota-kota satelit baru.

Kota-kota satelit ini menawarkan keamanan rumah dan daerah lingkungan pemukiman sekitarnya, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memasuki lingkungan ini dengan cara menunjukkan tanda pengenal mereka. Biasanya model-model dan nama-nama hunian di kota baru itu mengacu pada nama-nama yang ke barat-baratan seperti Green View, Taman Mediterania, dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Realitas ini dimunculkan oleh kota Depok. Sejumlah *apartement* terdapat di sepanjang Jl. Margonda seperti Margonda Residence, Park Vieww Condominium, Atlanta Residence Premium Apartment, Apartmen Park Vieww Condominium Detos, Apartment Saladin Mansion, dan Apartment Taman Melati. Bangunan *apartment* tersebut tidak hanya terdapat di Jl Margonda, melainkan menyebar di seluruh Depok.

*Apartment* Taman Melati yang lokasinya menempel dengan stasiun UI, banyak diminati oleh para mahasiswa UI, sebagai tempat pondokan. Biasanya mereka menyewa tipe studio, dan tinggal bersama rekannya. Dengan ongkos sewa berkisar antara 2, 5–3 juta rupiah/bulan.<sup>46</sup> Tidak hanya *apartment*, bentuk hunian lain seperti *cluster* dan *town house* juga mulai marak dibangun pada tahun 2000-an. Bentuk dan

---

<sup>44</sup> Peter J.M. Nas, "Kota Yang Berjiwa Simbolik Perkotaan di Indonesia," dalam Peter J. Nas, *Kota-kota di Indonesia* (terj. Nin Bakdisoemanto, Andri Nurcahyo, Krishna Dharma), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 93-123.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101

<sup>46</sup> Wawancara dengan Arie, alumni FIBUI, yang mempunyai dua kamar tipe studio di Apartment Melati, 8 Desember 2014, di Margo City

arsitektornya juga beragam. Hal yang menarik adalah munculnya perumahan atau hunian yang bercorak Islami.<sup>47</sup> Bentuk perumahan ini kebanyakan terdapat di luar kawasan Depok Lama, yang dulu dihuni oleh orang kampung dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Betawi (*ora*) dan Sunda.

Dari uraian tersebut nampak bahwa transformasi sosial-ekonomi warga Depok, hanya menguasai sektor marjinal dengan modal dan keuntungan yang kecil, seperti tempat pemondokan dengan tarif murah, tukang ojek, dan warung makan “sederhana”, dengan harga murah. Sementara tempat pemondokan dengan fasilitas yang lebih komplit, restoran dan fotokopi atau rental komputer pada umumnya adalah milik kaum pendatang dalam hal ini orang Jakarta.

## Penutup

Dalam perjalanan sejarah Depok dari Depok Lama ke Depok Baru, telah terjadi perubahan sosial di Depok, akibat adanya mobilitas penduduk. Keterpinggiran secara struktural yang dialami Depok, mengakibatkan Depok “tetap” dilihat sebagai daerah pinggiran. Hal ini ditunjukkan oleh kengganannya warga Jakarta yang tinggal di Depok untuk mengganti kartu identitasnya dengan KTP Depok, dan plat nomor kendaraan yang tetap memakai plat B. Kehadiran Universitas Indonesia telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Namun perubahan itu belum sepenuhnya. UI belum dapat memenuhi harapan Depok, menjadi identitas baru Depok. Depok adalah UI dan UI adalah Depok. Dengan demikian, UI tidak lagi hanya sekedar *We Are the Yellow Jacket, but We Are the Deppokers too*. Pada gilirannya akankah Depok menjadi bagian dari Jakarta seperti halnya Jatinegara?

## Daftar Pustaka

### Sumber-sumber Arsip dan Publikasi Resmi

Akte Notaris Soeroyo, nomor 18 Tanggal 4 Agustus 1952

*Memorandum Serah Terima Jabatan Rektor UI, 1986-1994*

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

---

<sup>47</sup> Hunian Islami, adalah Konsep hunian yang bernuansa Islam, sifatnya homogen, nama jalan semuanya menggunakan nama atau tempat-tempat Islam, terdapat tempat ibadah, dan pesantren. Lihat kreasikitaarsitektur.wordpress.com, diunduh pada 24 November 2014 pukul 05.00. Beberapa hunian itu antara lain Griya Rahmani (Beji Timur), Perum Muslim Ar Rayyan (Beji), Bukit Sakinah (Beji), Pondok Nurul Fikri (Cimanggis), Pesona Madani (Rangkapan), Madinah Residence (Sukmajaya) dan Azimah Beji Residence (Beji).

Subbagian Pengembangan Pegawai Universitas Indonesia, *Agenda Pengangkatan Pegawai Baru UI*, 1989

### **Surat Kabar, Majalah, dan Internet**

*Kompas*, 25 Mei 1987.

*Prisma*, No. 7 Tahun XXIII, Juli 1994

Kota Depok: Profil Daerah, [www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1063](http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1063), diunduh pada 7 Juli 2015, pukul 12.31

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). 13 September 2007.

"Puluhan Ribu Manusia Ditumpahkan Tiap pagi Dari Depok ke Jakarta", dalam *Kompas*, 22 Oktober 1978

### **Artikel Jurnal dan Buku**

Anderson, C. Arnold ., "a Skeptical Note on The Relation of Vertical Mobility to Education," dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 66, No. 6, May 1961

Breman, Jan., "Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal", dalam Chris Manning, dan Tadjudin Noer Effendi, (ed.), *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980

BKSP Jabotabek, *Studi Pengembangan Lingkungan Permukiman Depok*, 1982; dalam DTKTD, *RUTRK Depok: Buku Kompilasi Data*, 1987.

BPS, *Statistik Kendaraan Bermotor*, Jakarta, 1998.

*Executive Summary Jabotabek Development Planning*, 1980

Graafland, "Land-en Volkenkunde van *Nederlandsche Indie*- Depok: Eene etnografische studie", dalam *Mededeelingen van weege het Nederlandsche Zendelingengenootschap*, deel XXXV. Rotterdam, 1891

Hawigheerst, Robert J. *Human Development and Education*, New York: Longmans Green, 1953

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

Kantor Statistik Kabupaten Bogor, *Bogor Dalam Angka 1996, 1997, 1998*, Bogor: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, 1996-1998

Kantor Pemerintah Kotif Depok, *Pancoran Mas Dalam Angka 1999*.

-----, *Pendaftaran Ulang dan Izin Baru di Kotif Depok Tahun 1982- 1987*

-----, *Evaluasi dan Laporan Pembangunan di Kotif Depok tahun 1987-1989*.

Pemda Tk. II, *Kompilasi Data Rencana Umum Kota Depok*, Jakarta: kerjasama Pemda Tingkat II dan DTKD, Jakarta 1982.

Manning, Chris, *Struktur Opekerjaan Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1984.

- Mantra, Ida Bagus, *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Mantra, Ida Bagus, et.al., "Pola Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap daerah Yang Ditinggalkan, Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo, Madura, Ciamis, dan Asahan", *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Nas, Peter J.M., "Kota Yang Berjiwa Simbolik Perkotaan di Indonesia," dalam Peter J. Nas, *Kota-kota di Indonesia (terj. Nin Bakdisoemanto, Andri Nurcahyo, Krishna Dharma)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Suyarto, Djoko, "Pengembangan Kota Baru di Indonesia" dalam *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 Konsep dan Pendekatan Pembangunan perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Sugiyanto Soegiyoko, Urban and Regional Development Institute-Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003
- Poerwadarminta, W.J.S ; C.S. Hardjasoedarma, J.C.H.R. Poedjasoedira, *Baoesastra Djawa* J.B. Wolters Uitgevens Maatschappij: Groningen, Batavia, 1939
- Skeldon, Ronald, *Population Mobility in Developing Countries: A Reinterpretation*, London and New York: Belhaven, 1990
- Tjahyono, Gunawan., et.al., *Kampus Universitas Indonesia*, Jakarta: UI. Press, 2001

#### **Narasumber (Wawancara)**

- Wawancara dengan Arie, alumni FIBUI, yang mempunyai dua kamar type studio di Apartment Melati, 8 Desember 2014, di Margo City
- Wawancara dengan H. Bedong, penjaga kebun milik orang Jakarta, 24 Maret 1998.
- Wawancara dengan Cosmas Batubara, di kediamannya, Jl Cidurian, Jakarta Pusat, 9 Juni 2011.
- Wawancara dengan Badrul Kamal, mantan Walikota Depok, Depok 21 April, 2004
- Wawancara dengan Boy Loen, YLCC, Depok, 17 September 2011